



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OKA PRAWIRA
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG KETAHANAN NASIONAL
3. NHK : 860793

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.900.000.000

1. Tanah Seluas 1440 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL
SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 4122 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 2.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 3010 m2/400 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 491.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HARD TOP Tahun 1971, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.600.000.000



F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 10.991.500.000

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.991.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.